

Konferensi Nasional Sejarah VIII pada tanggal 14-17 November 2006 di  
Hotel Millenium Jakarta

# **PERADABAN LAUT DAN PERMASALAHAN TOPONIMI PULAU-PULAU DI SEKITAR SUMATRA**

Oleh : Dr. M. Nur, M.S.

Jurusan Sejarah Universitas Andalas  
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatra Barat

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA  
DIREKTORAT NILAI SEJARAH  
2006

## PERADABAN LAUT DAN PERMASALAHAN TOPONIMI PULAU-PULAU DI SEKITAR SUMATRA

Oleh : Dr. M. Nur, M.S.<sup>1</sup>  
Universitas Andalas

### ABSTRAK

Masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah dibicarakan Pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jumlah pulau-pulau tersebut belum valid karena luasnya perairan dan banyaknya taburan pulau-pulau yang belum mempunyai nama. Penyelesaian permasalahan Toponimi dimulai pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, atau pun Propinsi secara bertahap. Sebagian besar dari pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Pulau-Pulau di sekitar Sumatra telah memiliki peradaban laut sejak masa Klasik, tetapi belum memiliki nama. Pulau-pulau ini tersebar di Propinsi Kepulauan Riau (lebih kurang 156 pulau di Kabupaten Bintan, dan ratusan pulau di kabupaten lainnya), Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara. Sebagian besar dari pulau yang belum bernama tersebut telah dikenal oleh masyarakat setempat, terutama oleh para nelayan. Pulau-pulau yang belum memiliki nama secara nasional sudah seyogyanya dimunculkan dalam peta Indonesia dan dunia, karena dengan tercantumnya nama tersebut dapat menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara hanya dapat terwujud jika tidak ada lagi permasalahan Toponimi Indonesia.

#### **A. Pengantar**

Kalau anak jajahan menggugat penjajah adalah reaksi biasa, seperti yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda pada awal abad

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. dan Ketua MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Sumatra Barat. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII pada tanggal 14-17 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta yang diadakan oleh Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala Direktorat Nilai Sejarah.

ke-20. Ketika itu bermunculan gerakan-gerakan bangsa Indonesia secara terorganisasi untuk melawan Belanda atas kebijakannya yang tidak adil, pemaksaan, eksploitasi, pembodohan, dan sebagainya.<sup>2</sup> Akan tetapi lain halnya dengan penggugatan yang dilakukan oleh J.C Van Leur dan G.J. Resink. Mereka menggugat para sarjana bangsa Belanda, bangsanya sendiri supaya tidak melihat Indonesia hanya dari atas geladak kapal. Maksudnya adalah bahwa pada umumnya para sarjana Eropa melihat Indonesia dengan kaca mata Eropa, melalui perspektif Eropa atau *Eropa Centris*, khususnya *Neerlando Centris*.<sup>3</sup>

J.C Van Leur dan G.J. Resink menolak perspektif Eropa tersebut dan menyarankan untuk melihat Indonesia dari perspektif Indonesia sendiri atau *Indonesia Centris*. Pandangan mereka bertujuan untuk melihat dan mengungkapkan sejarah Indonesia dengan perspektif Indonesia dan bukanlah sejarah orang Eropa di Indonesia, tetapi benar-benar sejarah Indonesia sendiri.

Pandangan J.C Van Leur dan G.J. Resink membawa angin baru dalam penulisan Sejarah Indonesia sehingga sejarah Indonesia tidak bertahan dengan sifat konvensionalnya, tetapi berkembang dengan metodologi yang bersifat multidimensional.<sup>4</sup> Salah satu perkembangan

---

<sup>2</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 99.

<sup>3</sup> R.Z. Leirissa. "DR. J.C. Van Leur dan Sejarah Ekonomi : Suatu Tinjauan Historiografi", dalam Taufik Abdullah dan Edi Sedyawati (Penyunting). *Sejarah Indonesia Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1997, hal. 183.

<sup>4</sup> Pendekatan Multidimensional dalam penelitian Sejarah di Indonesia dirintis pertama kali oleh Sartono Kartodirdjo pada tahun 1966 ketika menyelesaikan Program Doktor di Universitas Amsterdam Belanda dengan disertasi yang berjudul

yang tidak bisa dihindari adalah perubahan yang lebih luas dalam pengkajian sejarah sehingga muncul kajian dengan pendekatan Multidimensional, di antaranya adalah peradaban laut (maritim).<sup>5</sup>

Pengkajian sejarah selama periode sejarah konvensional adalah tentang kejadian-kejadian di darat. Pada hal sangat banyak kejadian yang berlangsung di lautan atau perairan. Indonesia terdiri dari dua pertiga bagian dari wilayahnya adalah lautan dan hanya sepertiga bagian yang menjadi daratan. Laut yang sangat luas tersebut ditaburi oleh beribu-ribu pulau besar dan kecil sehingga membentuk **Negara Kelautan** yang ditaburi oleh pulau-pulau atau *Archipelagic State*. Negara Kelautan ini menurut A.B. Lopian terdiri dari laut inti yakni Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Banda, dan Laut Flores.<sup>6</sup>

Dalam kesenian Indonesia, lagu *Nenek Moyangku*, terselip bait lagu yang mengingatkan bahwa wilayah Republik Indonesia terdiri dari perairan yang sangat luas sehingga di mana-mana penduduknya berorientasi ke laut. Nenek Moyangku adalah seni khas nyanyi anak-anak Indonesia yang melukiskan aktifitas nenek moyang sebagai pelaut dan nelayan. Lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak yang sedang berada pada usia belajar dengan tujuan untuk membangkitkan spirit sebagai bangsa

---

Pemberontakan Petani Banten 1888. Lihat Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 87.

<sup>5</sup> Perintis Sejarah Maritim Indonesia pertama kali adalah Adrian B. Lopian, yang menyelesaikan disertasi Doktor di Program Pascasarjana Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul "Orang laut – Bajak Laut – Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad XIX".

<sup>6</sup> Adrian B. Lopian. "Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya", dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III*. Jakarta : Depdikbud RI, hal. 141.

pelaut di kawasan maritim Nusantara. Di antara sampiran dan isi bait nyanyi tersebut adalah sebagai berikut: “Nenek moyangku orang pelaut; Gemar mengharung luas Samudra; Menerjang ombak tiada takut; Menempuh badai sudah biasa”. Isi bait lagu itu menyatakan bahwa orang Indonesia pada umumnya berorientasi ke laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah para pelaut ulung yang telah berpengalaman berlayar di lautan. Disamping memiliki keahlian dalam navigasi mereka juga telah berpengalaman dalam menghadapi gelombang tinggi dan ombak besar. Angin kencang, badai, dan topan dihadapi mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama menghadapi Muson Barat dan Muson Timur.<sup>7</sup>

Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika sejarah peradaban laut dan pulau-pulau yang merupakan kegiatan maritim di sekitar Sumatra, yakni kawasan pantai barat dan Timur. Laut itu memainkan peranan penting dalam memajukan daerah pedalaman melalui perdagangan. Faktor pertumbuhan dan kemerosotan aktivitas laut terlihat dalam lintasan historis, corak dan dinamika hubungan ekonomi-politik antar laut. Dengan kata lain studi tentang peradaban laut di sekitar Pulau Sumatra adalah usaha untuk menggali dinamika dunia maritim pulau-pulau di Nusantara bagian barat.

---

<sup>7</sup>

R.Z. Leirissa, dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1996, hal. 21.

## **B. Geografis Pulau Sumatra**

Pulau Sumatra adalah bagian dari pulau-pulau di Nusantara yang termasuk pulau besar. Luas pulau ini adalah sekitar 473.606 kilometer persegi. Ada beberapa nama untuk pulau Sumatra, di antaranya Pulau Alas, Pulau Andalas, Pulau Perca, dan Pulau Sawit (diprediksikan pada masa yang akan datang), karena sedang terjadi penanaman sawit secara besar-besaran di punggug Pulau Sumatra. Pulau Alas berarti pulau hutan rimba. Penamaan ini berdasarkan atas kekhasan yang dimiliki oleh pulau tersebut, yakni berdasarkan kondisi Pulau Sumatra yang memiliki hutan rimba raya yang sangat luas dan memiliki potensi hasil hutan yang melimpah. Pulau Andalas berarti pulau yang banyak ditumbuhi oleh sejenis pohon yang bernama Andalas jenis *Morus Morus Macrourea*. Pohon Andalas tumbuh di sebagian besar bumi Sumatra sehingga disebut sebagai Pulau Andalas. Nama Pulau Perca berasal dari kata Perca, yang berarti getah. Perca adalah getah yang berasal dari pohon karet, Pohon ini banyak tumbuh di Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Pohon karet adalah komoditi Pulau Sumatra sejak zaman kolonial sampai masa Orde Baru.

Pulau Sumatra memanjang dari barat laut ke tenggara. Pulau-pulau kecil mengelilingi Pulau Sumatra, yang seolah-olah memagari pulau besar sebagai induk, yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Di antara pulau-pulau yang mengitari Pulau Sumatra adalah sekitar 194

pulau yang telah punya nama dan tersebar di beberapa daerah serta lebih kurang 300 pulau yang belum punya nama.<sup>8</sup> Pulau yang telah memiliki nama tersebar di wilayah, seperti Daerah Nangroe Aceh Darusslam (Pulau Weh, Pulau Breuen, Pulau Babi, Pulau Simeulue, Pulau Banyak, Pulau Tuangku, dan Pulau Bangkaru). Pulau yang terdapat di Daerah Sumatra Utara di antaranya adalah Pulau Nias, Pulau Ujung Batu, Pulau Musala, Pulau Tapak Kuda, Pulau Pini, Pulau Tanah Masa, dan Pulau Tanah Bela.

Daerah Sumatra Barat memiliki Pulau Tengah, Pulau Angas, Pulau Pisang, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Setak Kecil, Pulau Karsik, Pulau Pisang Keteng, Pulau Parsumpahan, Pulau Ular, Pulau Siberut, Pulau Masokut, Pulau Karang Manjat, Pulau Siburu, Pulau Sipora, Pulau Siduamata, Pulau Pagai Utara, Pulau Silabusabeu, Pulau Pagai Selatan, Pulau Taitaitanoro, Pulau Langairak, Pulau kaibulaubungai, Pulau Jujuan, Pulau Niau, Pulau Masilo, Pulau Maunuh, Pulau Simaimu, Pulau Dodiki, Pulau Panggalaran, Pulau Auso, Pulau Panjang, Pulau Ujung, Pulau Sauh, Pulau Piyeh, Pulau Air, Pulau Pandan, Pulau Bindalang, Pulau Toran, Pulau Sinyaru, Pulau Laut, Pulau Bintanggor, Pulau Marak, Pulau Nyamuk, Pulau Cubedak, Pulau Babi, Pulau Aur Gadang, Pulau Aur Kacik, Pulau Panju, Pulau Karsik Painan, Pulau Karaba Kacik, Pulau Katang-Katang, Pulau Baringin, Pulau Gosong, Pulau Karaba Besar, Pulau Gosong Nambi, Pulau Pototogat,

---

<sup>8</sup> Data ini diambil berdasarkan peta-peta yang diterbitkan untuk kepentingan pelajar dan siswa di Sekolah Dasar sampai Sekolah Tingkat Lanjutan Atas.

Pulau Pitojat, Pulau Muko, Pulau Siruamata, Pulau Sirso, Pulau Silabu Saberu, Pulau Pitojetsabeu, Pulau Sibigau, Pulau Libuat, Pulau Salowi, Pulau saumang, Pulau Pasimungguk, dan Pulau Sanding. Daerah Bengkulu memiliki Pulau Enggano, Pulau Tikus, Pulau Dua, Pulau Bangkai, Pulau Merbau, Pulau Kito, Pulau Satu.

Pulau-pulau yang terdapat Daerah Riau dan Kepulauan Riau adalah Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Kundur, Pulau Penyeler, Pulau Batam, Pulau Remping, Pulau Kelapa Jernih, Pulau Telan, Pulau Sugi, Pulau Combol, Pulau Ladi, Pulau Setoko, Pulau Subang Mas, Pulau Lobam, Pulau Noenang, Pulau Bulan, Pulau Rempang, Pulau Bintan, Pulau Mapoi, Pulau Galang Besar, Pulau Galang, Pulau Gin Besar, Pulau Numbing, Pulau Temiang, Pulau Sebangka, Pulau Buaya, Pulau Bakung, Pulau Bakong, Pulau Lingga, Pulau Selayar, Pulau Singkep, Pulau Kijang, Pulau Sambu, Pulau Pahat, Pulau Mubur, Pulau Matak, Pulau Nanas, Pulau Jemaja, Pulau Raibu, Pulau Tokong Piramida, Pulau Sekatung, Pulau Laut, Pulau Natuna Besar, Pulau Batang, Pulau Lagong, Pulau subu, Pulau Panjang, Pulau Midai, Pulau Serasan, Pulau Benuwa, Pulau Tambelan Besar, Pulau Pinang Seribu, Pulau Pejantan, Pulau Mas, Pulau Baso, dan Pulau Niur.

Pualu-pulau yang terdapat di Daerah Jambi adalah Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Daerah Sumatra Selatan mermiliki Pulau Alang Gantang. Sementara pulau-pulau yang terdapat di Daerah Bangka-



Belitung adalah Pulau Lepar, Pulau Liat, Pulau Selui, dan Pulau Mandanao. Daerah Lampung memiliki Pulau Pisang, Pulau Tabuan, Pulau Umang, Pulau Legundi Tua, Pulau sebuku, Pulau sebesi, Pulau Rakata Kecil, Pulau sertung, Pulau Rakata, Pulau Penjurit, dan Pulau Kandang Balik.

Baik pulau yang telah memiliki nama maupun belum menjadi tempat lalu lintas perdagangan dan dikunjungi oleh para pedagang dengan menggunakan alat angkutan laut. Sementara itu laju perkembangan pulau-pulau di bagian timur Sumatera mengalami peningkatan karena jalur perdagangan Selat Malaka berkembang dengan pesat. Barang-barang tambang misalnya dicari oleh orang Eropa ke pulau ini, seperti emas, batubara, timah, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat hasil perkebunan dan hasil hutan, seperti kemenyan, kapur barus, lada, damar, karet, kopi, cengkeh, kayu manis (*Casiavera*), karet, kelapa sawit, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### ***C. Peradaban Laut dan Pulau di Sekitar Sumatra***

Pada mulanya Pulau-Pulau di sekitar Sumatra adalah suatu kawasan yang tidak menarik dan tidak populer. Orang Eropa pada mulanya memandang dunia luarnya hanya sebatas Timur Tengah, Afrika, dan daratan Amerika. Akan tetapi setelah memasuki Perang Dunia Kedua, kawasan tersebut mulai diperhitungkan bangsa-bangsa Eropa

---

<sup>9</sup> Mhd. Nur. "Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20", *Disertasi*, Program Passcasarjana Universitas Indonesia, 2000, hal. 33-83.

karena menjadi kawasan yang strategis sebagai basis pertahanan perang oleh tentara Sekutu dan Jepang pada tahun 1939-1945. Secara otomatis kawasan yang menjadi bagian dari Asia Tenggara itu menjadi populer, baik bagi tentara Sekutu maupun bagi orang Eropa lainnya, terutama bagi para peneliti.<sup>10</sup>

Kegiatan perdagangan sebagai bagian dari peradaban laut berlangsung di pulau-pulau di sekitar Sumatra . Aktivitas itu didominasi oleh berbagai etnis yang melakukan pelayaran, seperti Bugis, Banten, Aceh, Minangkabau, Melayu, dan sebagainya. Kedatangan orang Eropa untuk mencari rempah-rempah di sekitar Sumatra berakibat pada perebutan pengaruh laut dan menjadikan beberapa pelabuhan utama sebagai pangkalan untuk mengawasi daerah penghasil rempah-rempah. Sampai abad ke-16 penduduk pulau di sekitar Sumatra sudah sedemikian akrab dengan perdagangan dan pelayaran, sehingga mereka tidak merasa asing lagi dengan dunia kelautan dan telah mengetahui sistem angin musim dan ilmu perbintangan. Tidak heran bahwa beberapa pulau tertentu selalu dicari karena menjual barang-barang tertentu. Setelah kehadiran pedagang asing di kawasan itu maka beberapa pulau menjadi tempat pemukiman para pedagang, seperti Pulau Cingkuik, Pulau Mursala, Pulau Poncan Ketek, Pulau Tanah Masa, Pulau Tapak Kuda, Pulau Bintan, Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan sebagainya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> John F. Cady. *The History of Post War Southeast Asia Independent Problems*. Athens, Ohio : Ohio University Press, 1980, p. 1.

<sup>11</sup> Tsuyoshi Kato. "Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Pada Abad XIC", dalam Akira Nagazumi. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986, hal. 77.

Pulau-pulau di sekitar Sumatra didiami oleh suku bangsa yang memiliki kebudayaan khas, seperti Aceh, Minangkabau, Batak, Rejang Sawah, Pekal, Enggano, Mentawai, Anak Dalam, Muko-Muko, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Sebagian dari suku tersebut tinggal di daerah pesisir. Menurut sumber-sumber Tiongkok, kerajaan-kerajaan yang terletak di pantai timur Pulau Sumatra telah berdagang langsung dengan India Selatan sejak tahun 250 Masehi sampai awal abad ke-5 Masehi. Perluasan rute perdagangan selanjutnya sebagai kekuatan laut adalah Sumatra bagian selatan, yang terletak antara Jambi dan Sungai Musi.<sup>12</sup> Sejak tahun 430 Masehi sampai abad ke-7 Masehi perdagangan laut antara India dan Tiongkok (Canton) dikontrol oleh kekuatan pantai di sekitar Sumatra. Ketika itu rempah-rempah, kapur barus dan kemenyan dari Sumatra telah sampai di India dan di Kekaisaran Romawi. Pengaruh-pengaruh peradaban tersebar melalui jalan perdagangan ini. Para pelaut, saudagar, dan emigran dari India diikuti oleh para pendeta Hindu yang didatangkan oleh raja-raja Kepulauan Nusantara dan ditempatkan di kraton-kraton. Mereka bertugas sebagai penasehat raja di istana. Dengan demikian Hinduisme (dalam istilah ini termasuk juga semua aliran pikiran atau ilmu lainnya yang timbul di India) tersebar ke timur, meliputi Asia Tenggara pada umumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> F.H. Van Naerssen dan R.C. De Jongh. *The Economic and Administrative History of Early Indonesia*. Leiden/ Koln: E.j. Brill, 1977, p. 30.

<sup>13</sup> Anthony Reid. *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 175.

Peradaban dagang telah menjadi sumber perekonomian yang utama ketika itu. Hubungan peradaban antara Sumatra dan India memberi kesempatan bagi para pedagang Sumatra untuk saling menerima kebudayaan antara sesama pedagang. Mereka juga mengetahui organisasi-organisasi yang terbentuk dalam perdagangan, seperti Kelompok 500 dan Kelompok 1500 di Barus, kota tua di pantai barat Sumatra.<sup>14</sup> Pulau-pulau di sekitar Sumatra umumnya memiliki garis pantai yang baik untuk persinggahan pelayaran, baik pulau besar maupun pulau kecil. Kapal dan perahu dibuat oleh arsitek tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan transportasi air sesuai dengan kondisi perairan masing-masing. Tidak terlepas pula dari sistem kepercayaan dan peradaban masyarakat kelautan atau maritim.

#### ***D. Masalah Toponimi di sekitar Sumatra***

Di antara pulau-pulau kecil yang mengitari yang mengitari Pulau Sumatra sebagai pulau yang besar berjumlah sekitar 495 pulau. Hanya sekitar 195 di antaranya yang telah memiliki nama. Sementara terdapat sekitar 300 pulau yang belum memiliki nama. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi keutuhan dan ketahanan nasional Indonesia. Masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah dibicarakan Pemerintah sejak awal kemerdekaan, tepatnya 17 Februari 1969, ketika

---

<sup>14</sup> K.A. Nilakanta Sastri. "A Tamil Merchant Guild in Sumatra", dalam *TBG* 72, 1932, hal. 314-327. Lihat juga M. Nur. "Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20". Jakarta: *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000, hal. 56.

Pemerintahan Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen negara Republik Indonesia. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam membuat perjanjian dengan negara-negara Asia Tenggara umumnya dan ASEAN khususnya. Sejak dasawarsa terakhir semua negara yang berada di Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN. Di antara perjanjian yang telah disepakati adalah dengan Malaysia (27 Oktober 1969), Thailand ((17 Desember 1961), Malaysia II dan Thailand (21 Desember 1971), Australia (18 Mei 1971), Singapura (25 Mei 1973), India (8 Agustus 1974), dan Australia II (9 Oktober 1973).<sup>15</sup>

Walaupun perjanjian telah dibuat dan disetujui oleh negara tetangga, namun persoalan landas kontinen tidak pernah selesai karena rumitnya letak suatu pulau-pulau dalam bentuk taburan yang besar. Persoalan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Blok Ambalat adalah masalah landas kontinen yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2005. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi akibat status pulau yang tidak jelas pengelolaannya. Blok Ambalat adalah landasan kontinen Indonesia yang terletak di dibawah perairan Laut Sulawesi. Landasan ini terletak pada kedalaman 2.500 meter di bawah permukaan laut.

Malaysia telah melakukan pemboran minyak di sekitar Blok Ambalat. Aktivitas Malaysia ini mendapat protes dari Indonesia dengan melakukan patroli gabungan antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara

---

<sup>15</sup> Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta : Dikti Depdikbud – Gramedia, 1983, hal. 19.

Indonesia. Selain itu Indonesia melakukan pengeboran minyak di kawasan Blok Ambalat. Pengeboran tersebut sebelumnya telah dikuasakan Indonesia kepada perusahaan ENI Italia dan Perusahaan Unocal Amerika Serikat. Kehadiran TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah di kawasan Ambalat dan mengawasi pembangunan mercuar suar membuat Pemerintah Malaysia mengeluarkan Nota Protes terhadap Indonesia atas tindakan itu. Nota Protes tersebut dilayangkan kepada kepada Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Abdurrahman M. Fakhir. Aktivitas yang dilakukan Indonesia di Blok Ambalat adalah membangun Mercu Suar di Pulau Karang Menarang. Pulau ini dianggap oleh Malaysia sebagai miliknya. Pembangunan Mercu Suar inilah yang memancing konflik antara Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencari suatu upaya solusi terbaik dalam menjelaskan pemilikan yang tumpang tindih terhadap suatu pulau.<sup>16</sup>

Malaysia menuntut bahwa perairannya di sebelah timur Kalimantan Utara lebih dari 12 mil, pada hal Malaysia bukanlah negara Kepulauan. Berbeda halnya dengan Indonesia, bahwa menurut hukum internasional wilayah perairan Indonesia terluar adalah sejauh 200 mil dari garis pantai pasang surut. Batasan ini dideklarasikan ketika munculnya ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) Indonesia pada 21 Maret 1980. Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan perbedaan status pulau-

---

<sup>16</sup> "Malaysia Tetap Klaim Ambalat , Tolak Argumentasi Indonesia", dalam *Media Indonesias*, 9 Maret 2005.

pulau yang terletak di perbatasan, seperti Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Landasan Ambalat, dan Pulau Karang Gumarang.

Peristiwa yang terjadi pada Pulau Sipadan, Ligitan, dan Blok Ambalat memungkinkan juga terjadi di pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Sumatra khususnya bagi pulau yang belum memiliki nama. Pulau-pulau ini tersebar sebagian besar di Propinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau (lebih kurang 156 pulau di Kabupaten Bintan dan ratusan pulau di kabupaten lainnya), Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara. Sebagian besar dari pulau yang belum bernama tersebut telah dikenal oleh masyarakat setempat, terutama nelayan. Mereka menyebut pulau yang didarati sesuai dengan kekhasan pulau itu, namun belum tercatat dalam peta Indonesia. Pulau-pulau yang belum memiliki nama secara nasional sudah seyogyanya dimunculkan dalam peta Indonesia dan dunia.

Keberadaan nama pulau dapat menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara hanya dapat terwujud jika tidak ada lagi permasalahan toponimi Indonesia. Konsep perbatasan *Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*<sup>17</sup> yang menetapkan bahwa jarak laut wilayah Indonesia adalah sekitar 200 mil dari garis pantai terluar Indonesia harus diaplikasikan dengan pembuatan nama pulau-pulau kecil yang belum bernama atau mencantumkan nama pulau tersebut pada peta nasional.

---

<sup>17</sup>Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). *Op. Cit.*

Sistem pertahanan Indonesia akan tetap rawan apabila bangsa Indonesia tidak mengenal pulau-pulau yang dimilikinya. Kebutuhan yang sangat urgen bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah teritorial adalah memberi nama pulau yang belum bernama supaya dikenal oleh masyarakat dunia.

### ***E. Kesimpulan***

Kajian tentang tradisi peradaban laut di sebuah kawasan pulau-pulau merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah Sumatra terdiri dari ratusan pulau yang bertaburan di dalam perairan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Selat Sunda dan Selat Karimata. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia keseluruhan yang terdiri dari 13.677 pulau, maka persoalan Toponimi tentunya semakin besar karena hanya sekitar 5000 pulau yang telah memiliki nama. Penduduk Indonesia sendiri tidak mengenal dengan baik pulau yang menjadi milik mereka. Pengalaman konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia menyentak bangsa Indonesia terhadap kepemilikan tanah air atas pulau-pulau.

Pulau Sumatra adalah pulau terbesar di bagian barat Indonesia dan berdekatan letaknya dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Bangladesh, India, dan Srilanka. Pulau Sumatra dan pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memiliki peradaban laut yang tinggi sejak abad pertama Masehi sehingga suku bangsa yang terdapat di sekitarnya telah mengenal



peradaban laut melalui perdagangan dan pelayaran. Kondosi ini sangat didukung oleh “Jalan Sutra Laut” antara Cina dan India. Pulau-pulau kecil yang belum memiliki nama di sekitar Pulau Sumatra tersebar sebagian besar di Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara. Pulau-pulau yang belum memiliki nama di kawasan Sumatra sudah seyogyanya dicatatkan dalam dokumen berupa peta Indonesia supaya bisa menjadi bukti bahwa pulau-pulau tersebut adalah milik Indonesia. Keberadaan pulau yang jelas dan konkrit dapat meningkatkan stabilitas nasional Indonesia. Kondisi sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi penduduk sebuah pulau untuk memihak kepada kekuatan yang melindunginya.

Aktivitas yang harus dilakukan Indonesia terhadap pulau-pulau di kawasan Sumatra dan kawasan Indonesia lainnya adalah memberi nama semua pulau yang belum dikenal dan memberdayakan penduduk di sekitarnya serta membangun Mercu Suar di pulau-pulau tertentu dengan jarak yang relatif dekat. Mercu Suar dapat menjadi pertanda bahwa pulau tersebut dalam pengelolaan negara Indonesia dengan membangun bidang fisik dan mental.

Selama berabad-abad Pulau Sumatra dan pulau-pulau kecil di sekitarnya telah menjadi pangkalan perdagangan sebagai urat nadi perekonomian yang ditunjang oleh peradaban laut. Pulau yang terbesar di bagian barat Nusantara ini juga pernah menjadi pangkalan pelayaran di Samudra Hindia. Kapal-kapal dan perahu yang berlayar menuju

Madagaskar pada masa kuno bertolak dari Pulau Sumatra. Dalam kurun abad ke abad Pulau Sumatra tetap berfungsi sebagai pangkalan perdagangan dan pelayaran, karena perut buminya banyak mengandung sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penggunaan kata untuk pemberian nama sebuah pulau haruslah mencerminkan kekhasan pulau itu, seperti hasil bumi, hasil hutan, tipe ikan, bahan tambang, peran sejarah, kultural, sosial, jenis tanah atau pasir, tumbuhan khas, dan sebagainya yang terdapat di pulau tertentu.

## BIBLIOGRAFI

- A. Robert, Ragotzkie, J. Robert Moore. *Man and the Marine Environment*. Boca Rotan, Fla: CRC Press, 1983.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Basu, Dilip K. *The Rise and Growth of the Colonial Port Cities in Asia*. Lanham-New York-London: Academic Press of America, 1985.
- Biro Pusat Statistik. *Lalu Lintas Barang Antar Pulau Menurut Jenis Pelayaran (Interisland Cargo Flows By Shipping Sector)*. Jakarta: BPS, 1976.
- BPPT. *Teknologi Angkutan Laut Masa Kini dan Masa Datang*. Jakarta: BPPT, 1985.
- Broeze, Frank, ed. *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16<sup>th</sup> – 20 Centuries*. Kensington: New South Wales University Press, 1989.
- Burger, D.H. *Sedjarah Ekonomis dan Sosiologis Indonesia. Jilid I*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1960
- Cady, John F. *The History of Post War Southeast Asia Independent Problems*. Athens, Ohio : Ohio University Press, 1980.
- Chaudhuri, K.N. *Trade and Civilisation in the Indian Ocean, An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney: Cambridge University Press, 1989.
- Cortesaio, A. *The Suma Oriental of Tome Pires, An Account of the East....* London: Hakluyt Society , Seri ke-2, Jilid XXXIX dan XL, 1967.
- Couper, Alastair. *The Time Atlas and Encyclopaedia of the Sea*. London: Times Books, 1989.
- Currie, R. *Some Reflection on the International Indian Ocean Expedition*. Mar. Biol. Ann., Rev., 1966.
- Deric, David. *Navigation for Offshore and Ocean Sailor –and Impression*. London: David & Charles, 1985.
- Dick, Howard W. "Prau Shipping in Eastern Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies XI*. Bagian I. No. 2, p. 79-107.

- *The Indonesian Interisland Shipping Industry An Analysis of Competition and Regulation*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1987.
- *Industri Pelayaran Indonesia, Kompetisi dan Regulasi*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Dobbin, Christine. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra, 1748-1847*. Jakarta: INIS, 1992.
- Durbani, Muh. *Analisa Biaya Pengangkutan Kayu dengan Perahu Layar*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM, 1981.
- Hall, Kenneth R. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Sydney-Wellington: George Allen & Unwin, 1985.
- Hansen, Harold. *The Developing Countries and International Shipping*. Washington: The World Bank (World Bank Staff Working Paper No. 502), 1981.
- Heng, Leong Sau. "Collecting Centres, Feeder Points and Entrepots in the Malay Peninsula, 1000 B.C. – A.D. 1400", dalam J. Kathirithamby-Wells & John Villiers, ed. *The Southeast Asian Port and Polity Rise and Demise*. National University of Singapore: Singapore University Press, 1990.
- Horridge, Adrian. *The Prahau Traditional Sailing Boat of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1981.
- J. Kathirithamby-Wells. "Banten: A West Indonesian Port and Polity During the Sixteenth and Seventeenth Centuries", dalam J. Kathirithamby-Wells & John Villiers, ed. *The Southeast Asian Port and Polity Rise and Demise*. National University of Singapore: Singapore University Press, 1990.
- K.A. Nilakanta Sastri. "A Tamil Merchant Guild in Sumatra", dalam *TBG* 72, 1932.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Kato, Tsuyoshi. "Rantau Pariaman: Dunia Saudagar Pesisir Minangkabau Pada Abad XIX", dalam Akira Nagazumi. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Kerr, Alex. *The Indian Ocean Region Resources and Development*. Colombo: University of Western Australia Press, 1990.

Lapian, A.B. "Pelayaran Pada Masa Sriwijaya", dalam *Praseminar Penelitian Sriwijaya*, Jakarta 7-8 Desember 1978. Jakarta: Proyek Penelitian dan Penggalan Purbakala Depdikbud, 1978.

----- *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari*. Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia Pada Tanggal 4 Maret 1992.

----- "Perebutan Samudera: Laut Sulawesi Pada Abad XVI dan XVII", *Prisma*, 11. Jakarta: LP3ES, 1984

----- "The Diversity Unity of Maluku-Kie-Raha Its Historical Development", dalam Kenji Tsuchiya, ed. *States in Southeast Asia: From "Tradition to Modernity"*. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1984.

----- "Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX". Yogyakarta: *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, 20 April 1987.

----- "Dunia Maritim Asia Tenggara", Ceramah dalam rangka penilaian kembali karya-karya utama sejarawan asing tentang Sejarah Indonesia. Puslit Kemasyarakatan dan Budaya LPUI Depok, 1991.

----- "Kerajaan-Kerajaan di Nusantara Bagian Timur Abad XVI-XIX". *Makalah*, Seminar Internasional Bahasa Melayu Abad XVIII-XX: Bahasa Resmi dan Bahasa Diplomasi, Latar Belakang Sejarah, 18-19 Agustus 1993, LIPI-UI Jakarta.

----- "Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya", dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi III. Jakarta : Depdikbud RI.

----- "Some Explorations in the History of the Maritime World of Southeast Asia", *Text of Special Lecture Delivered at the 13<sup>th</sup> Conference of the IAHA*. Tokyo: 5-8 September 1994.

----- "Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya". *Makalah*, Kongres Nasional Sejarah Tahun 1996. Jakarta: Depdikbud, 1996.

Leirissa, R.Z., dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

----- "DR. J.C. Van Leur dan Sejarah Ekonomi : Suatu Tinjauan Historiografi", dalam Taufik Abdullah dan Edi Sedyawati (Penyunting). *Sejarah Indonesia Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1997.

- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta : Dikti Depdikbud – Gramedia, 1983.
- Leur, J.C. van. *Indonesian Trade and Society: Essays in Asiatic Social and Economic History*. Den Haag: W. van Hoeve, 1960.
- Loir, Henri Chambert, Hasan Muarif Ambary. *Panggung Sejarah, Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient-Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*. Terjemahan Winarsih. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan. Jilid 1*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia. Jilid 2*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jilid 3*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- "Malaysia Tetap Klaim Ambalat , Tolak Argumentasi Indonesia", dalam *Media Indonesias*, 9 Maret 2005.
- Manguin, P.Y. "The Southeast Asian Ship: An Historical Approach", *Journal of Southeast Asian Studies*. Singapore: Singapore University Press, Vol. XI, No. 2, 1980.
- "The Merchant and the King, Local Perception of Ancient Maritime Trade and the Foundation of Harbourstates in Insular Southeast Asia", *AAS Meeting*, March 1989.
- "The Trading Ship of Insular South-East Asia New Evidence from Indonesian Archeological Sites". *Proceeding*, Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI. Yogyakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, studi Regional 4-7 Juli 1989.
- Mahmud, Jatim. "Terangkailah Sudah Kepulauan Nusantara Kita", *Maritim Indonesia*. Jakarta: Yayasan Marindo Press, 9 Nopember 1984.
- Marsden, F.R.S. William. *The History of Sumatra, Containing, an Account of the Governement, Laws, Customs, and Maners and a Relation of the Ancient Political State of that Island*. London: J. M`Creery, Black-Horse-Court, 1811. (Diterjemahkan oleh A.S. Nasution dan Mahyuddin Mendim menjadi: William Marsden. *Sejarah Sumatra*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.)

- Nagazumi, Akira. *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang, Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Nooteboom, C. *The Boomstamkano in Indonesia*. Leiden: E.J. Brill, 1932.
- "Sumatra en de Zeevaart op de Indische Ocean", *Indonesie*, Tahun IV, 1950/1951.
- *Sumatra dan Pelajaran di Samudera Hindia*. Terjemahan N.J.P.S. Kusumo Sutoyo). Jakarta: Bhratara, 1972.
- Naerssen, F.H. Van and R.C. de longh. *The Economic and Administrative History of Early Indonesia*. Leiden/Koln: E.J. Brill, 1977
- Nur, Mhd.. "Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra pada Abad Ke-19 sampai Pertengahan Abad Ke-20", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000.
- Peta Laut Pelabuhan Pulau Pisang Gadang". *Algemeen Rijks Archief*, Katalog 1344. Den Haag: 1874.
- Pamuncak, K. St. dan Achmad Ichsan. *Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ponto, Christian d., A.B. Lopian, dkk. *Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia, 1990.
- Purwaka, Tommy H. *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Pires, Tome. *The Suma Oriental* . Terj. Armando Cortesao. London: Hakluyt Society , 1944.
- Ponto, Christian d., A.B. Lopian, dkk. *Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia, 1990.
- Rajamanickam, G. Victor dan Subbarayatu, ed. *History of Traditional Navigation*. Thanjavur: Tamil University, 1988.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- *Dari Ekspansi Hingga Krisis, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- *The Contes for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898*. Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Richards, D.S., ed. *Papers on Islamic History II, Islam and the Trade of Asia*. Pencylvania: University of Pencylvania Press, 1970.

- Roelofs, M.A.P. Meilink. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Satari, Sri Soejatmi. "Landasan Timbul dan Berkembangnya Kehidupan Ekonomii di Majapahit: dalam *Kehidupan Ekonomi Masa Lampau Berdasarkan Data Arkeologi. Jilid I*. Jakarta: Proceeding Analisis Hasil Penelitian Arkeologi II, Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, Depdikbud, 8-11 Nopember 1991.
- Soebekti, R.S. *Hukum Perkapallan Untuk Mualim dan Ahli Mesin Kapal Pelayaran Niaga*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Soejono, Wiwoho. *Sarana Penunjang Angkutan Laut, "Aid to Navigation"*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Surapti, Mc., dkk. *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan: Kasus Barus dan Sibolga*. Jakarta: Depdikbud, 1994/1995
- Tjandrasasmita, Uka. "Peranan Samudera Pasai Dalam Perkembangan Islam di Beberapa Daerah Asia Tenggara", dalam Hasan Muarif Ambary dan Bachtiar Ali. *Restrospeksi Budaya Nusantara*. Jakarta: Taman Iskandar Muda, 1988.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara, A History of Indonesia*. The Hague: W. van Hoeve, 1965..
- Webert, Max. *The City*. New York: Colliers Books, p. 1958. Lihat juga Sartono Kartodirdjo. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Wolters, O.W.. *Early Indonesian commerce : A Study of the Origin s of Srivijaya*. Ithaca-New York: 1967.
- Wells, J. Kathirithamby, John Villiers. *The Southeast Asian Port and Polity Rise and Demise*. National University of Singapore: Singapore University Press, 1990.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change*. The Hague: W. van Hoeve, 1956.